



FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO ISLAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Mohammad Sof'an

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat

E-mail: sofankiara@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi makro Islam merupakan bagian penting dari kajian ekonomi syariah yang membahas aktivitas perekonomian secara agregat dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan normatif dan analitis. Berbeda dengan pendekatan makroekonomi konvensional yang umumnya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan eksternal, ekonomi makro Islam menempatkan pencapaian kesejahteraan manusia (falah), keadilan distributif, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai bagian integral dari tujuan perekonomian. Artikel ini bertujuan menganalisis fundamental ekonomi makro Islam dalam perspektif ekonomi syariah, meliputi landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, tujuan makroekonomi, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa fundamental ekonomi makro Islam tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan variabel ekonomi agregat, tetapi juga dengan pembentukan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan keuangan publik berbasis syariah dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi makro Islam menawarkan kerangka yang mengintegrasikan dimensi material dan moral dalam pengelolaan perekonomian.

Kata kunci: Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Syariah, Keadilan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Falah.

PENDAHULUAN

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas aktivitas perekonomian secara agregat. Permasalahan yang menjadi perhatian ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, konsumsi, investasi, distribusi pendapatan, serta kebijakan fiskal dan moneter. Berbagai persoalan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan ekonomi makro menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan suatu negara.

Dalam perspektif Islam, persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan tujuan syariah. Aktivitas ekonomi bukan semata-mata proses produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memperoleh keuntungan material, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000).

Chapra (1992) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama ekonomi adalah bagaimana menciptakan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan manusia, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta kekayaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan output, tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam konteks ekonomi makro Islam, pertumbuhan ekonomi tetap memiliki kedudukan penting. Islam tidak menolak aktivitas produksi, investasi, perdagangan, maupun pengembangan kekayaan. Namun, pertumbuhan ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka moral dan sosial. Pertumbuhan yang menghasilkan peningkatan output tetapi disertai konsentrasi kekayaan yang berlebihan dan ketimpangan sosial perlu dikritisi dari perspektif ekonomi Islam (Husni, 2020).

Keadilan distribusi menjadi salah satu pembeda penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut. Harta mengandung tanggung jawab sosial sehingga terdapat mekanisme syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks makroekonomi, zakat bahkan dapat dianalisis sebagai salah satu instrumen fiskal. Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat dimasukkan ke dalam model makroekonomi dan memiliki potensi sebagai instrumen kebijakan yang bersifat counter-cyclical. Pada saat perekonomian mengalami pelemahan, peningkatan distribusi zakat kepada kelompok penerima dapat membantu meningkatkan pengeluaran agregat dan aktivitas ekonomi.

Kajian empiris yang lebih baru juga menunjukkan adanya hubungan antara keuangan sosial Islam dan pertumbuhan ekonomi. Siswanto dan Ikhwan (2023), misalnya, mengkaji kontribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memasukkan pengeluaran pemerintah, investasi, dan keterbukaan perdagangan sebagai variabel kontrol. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki relevansi untuk dikaji dalam kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Fauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan wakaf berbasis digital dapat memperluas pengelolaan wakaf dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa instrumen ekonomi Islam dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan ekonomi makro Islam juga mencakup kebijakan moneter. Larangan riba merupakan salah satu karakteristik penting sistem ekonomi Islam sehingga pengembangan sistem moneter

syariah tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan sistem moneter konvensional. Dalam konteks Indonesia yang menggunakan sistem perbankan ganda, bank syariah tetap berinteraksi dengan sistem moneter nasional. Ponziani dan Mariyanti (2019) menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki hubungan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem moneter ganda.

Dengan demikian, kajian mengenai fundamental ekonomi makro Islam penting dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kerangka konseptual terhadap persoalan makroekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis fundamental ekonomi makro Islam yang meliputi landasan filosofis, prinsip dasar, tujuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, stabilitas harga, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai fundamental ekonomi makro Islam dalam perspektif ekonomi syariah.

Sumber data penelitian berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam, ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, zakat, wakaf, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Literatur yang digunakan mencakup karya fundamental ekonomi Islam serta artikel jurnal yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu: (1) landasan filosofis ekonomi Islam; (2) prinsip ekonomi makro Islam; (3) tujuan ekonomi makro Islam; (4) pertumbuhan ekonomi; (5) distribusi pendapatan; (6) stabilitas ekonomi; (7) kebijakan fiskal; dan (8) kebijakan moneter.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap analisis meliputi reduksi informasi, klasifikasi gagasan berdasarkan tema, interpretasi hubungan antarkonsep, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai karakteristik fundamental ekonomi makro Islam dan relevansinya terhadap persoalan ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fundamental Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam dapat dipahami sebagai kajian mengenai aktivitas perekonomian pada tingkat agregat dengan menggunakan prinsip dan nilai Islam sebagai landasan normatif. Dengan pengertian tersebut, ekonomi makro Islam tetap membahas berbagai variabel yang menjadi

perhatian ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, konsumsi, investasi, distribusi pendapatan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Perbedaannya terutama terletak pada landasan nilai, tujuan, dan batasan aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan moral. Aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan individual, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Chapra (2000) mengkritik pendekatan ekonomi yang terlalu menekankan dimensi material dan mengabaikan dimensi moral dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, fundamental ekonomi makro Islam tidak hanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan output nasional, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa kegiatan ekonomi menghasilkan kemaslahatan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi yang adil, kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Konsep tersebut dapat diringkas dalam beberapa fondasi utama, yaitu tauhid, khilafah, amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keenam unsur tersebut menjadi dasar dalam memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dengan tujuan syariah.

Landasan Filosofis Ekonomi Makro Islam

1 Tauhid

Tauhid merupakan landasan paling fundamental dalam pandangan hidup Islam. Dalam konteks ekonomi, tauhid memberikan pemahaman bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya berada dalam kekuasaan Allah. Manusia memperoleh amanah untuk mengelola sumber daya tersebut.

Implikasinya adalah aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya bebas nilai. Produksi, konsumsi, distribusi, dan transaksi keuangan harus mempertimbangkan ketentuan halal dan haram serta dampaknya terhadap kehidupan manusia.

2 Khilafah

Konsep khilafah memberikan kedudukan kepada manusia sebagai pengelola bumi. Dalam konteks ekonomi makro, konsep ini mengandung konsekuensi bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi kepemilikan tersebut mengandung tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak seharusnya menjadi sarana eksploitasi atau dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu.

3 Amanah

Kekayaan dan sumber daya ekonomi merupakan amanah. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya tidak hanya dinilai dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari cara memperoleh dan menggunakannya.

Konsep amanah memberikan dasar moral bagi pengelolaan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun negara.

4 Keadilan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam. Husni (2020) menjelaskan bahwa keadilan dalam sistem ekonomi Islam memiliki dimensi individual dan sosial. Dalam dimensi

sosial, keadilan berkaitan dengan pencegahan eksploitasi, monopoli, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi makro tidak hanya berarti pemerataan pendapatan, tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi.

5 Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan orientasi penting dalam ekonomi syariah. Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan kebijakan ekonomi dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan *maqāṣid* memberikan ruang untuk melihat pembangunan ekonomi tidak hanya dari indikator material, tetapi juga dari kualitas kehidupan manusia dan keberlanjutan kesejahteraan (Isnain et al., 2026).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Makro Islam

Fundamental ekonomi makro Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip berikut.

1 Prinsip Keadilan

Keadilan menuntut agar aktivitas ekonomi tidak menghasilkan eksploitasi dan ketimpangan yang berlebihan. Dalam konteks makroekonomi, keadilan berkaitan dengan distribusi pendapatan, akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan kebijakan pemerintah.

2 Prinsip Keseimbangan

Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan material dan spiritual. Prinsip ini penting karena pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan dapat mengabaikan dimensi sosial.

3 Larangan Riba

Larangan riba merupakan karakteristik fundamental sistem ekonomi Islam. Prinsip ini mendorong pengembangan hubungan keuangan yang didasarkan pada transaksi yang sesuai syariah dan pembagian risiko.

4 Larangan Gharar dan Maysir

Gharar dan maysir dilarang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip tersebut memberikan batasan terhadap aktivitas ekonomi yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas.

5 Penguatan Sektor Riil

Ekonomi Islam menekankan keterkaitan antara aktivitas keuangan dengan sektor riil. Pembiayaan seharusnya memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa.

6 Distribusi Kekayaan

Distribusi menjadi salah satu perhatian utama ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme redistribusi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Ekonomi Makro Islam

Tujuan ekonomi makro Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan ekonomi Islam secara umum. Tujuan tersebut bukan hanya pencapaian indikator material, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Chapra (1992) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan, pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan pendapatan serta kekayaan sebagai bagian dari agenda ekonomi Islam.

Berdasarkan perspektif tersebut, tujuan ekonomi makro Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. mengurangi kemiskinan;
4. menciptakan kesempatan kerja;
5. menjaga stabilitas ekonomi;
6. menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil;
7. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
8. menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moral.

Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi makro Islam tidak cukup menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto sebagai satu-satunya ukuran.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam tidak menolak pertumbuhan ekonomi. Aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, pertumbuhan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas. Pertumbuhan harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan tidak menghasilkan kerusakan sosial maupun lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Siswanto dan Ikhwan (2023) menggunakan data Indonesia periode 2002–2022 untuk menganalisis kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Hamidi et al. (2024) juga menguji hubungan investasi, dana ZIS, dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya memasukkan instrumen ekonomi Islam ke dalam pembahasan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Islam bukan berarti menolak konsep pertumbuhan modern, tetapi memberikan orientasi bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan, produktivitas, dan kemaslahatan.

Distribusi Pendapatan dan Keadilan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin distribusi hasil pembangunan yang merata.

Ekonomi Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut. Zakat menjadi salah satu instrumen redistribusi yang secara eksplisit memiliki fungsi sosial ekonomi. Zakat mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang wajib membayar kepada kelompok yang berhak menerima.

Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat dimasukkan ke dalam analisis kebijakan fiskal. Dalam model yang dikembangkannya, pengeluaran zakat dapat memengaruhi konsumsi agregat dan berpotensi digunakan sebagai instrumen stabilisasi.

Penelitian Supratman dan Asih (2022) juga menemukan hubungan antara zakat, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian lain di Indonesia menunjukkan bahwa ZIS juga relevan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi (Triyawan et al., 2022; Safitri et al., 2024).

Meskipun demikian, zakat tidak dapat diposisikan sebagai pengganti seluruh instrumen fiskal negara. Zakat memiliki ketentuan syariah mengenai objek, tarif, dan penerima. Karena itu, integrasi zakat dengan kebijakan publik memerlukan desain kelembagaan yang tepat.

Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Makro

Zakat memiliki karakteristik yang berbeda dari pajak. Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban keagamaan dengan ketentuan syariah mengenai jenis harta, nisab, haul, dan penerima.

Dalam perspektif makroekonomi, zakat dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan konsumsi. Kelompok penerima zakat pada umumnya berasal dari kelompok yang membutuhkan sehingga distribusi zakat dapat meningkatkan kemampuan konsumsi dan produktivitas mereka.

Mustamin et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat dapat dipahami sebagai instrumen fiskal yang memiliki potensi untuk membantu stabilitas ekonomi, meningkatkan permintaan agregat, mengurangi kemiskinan, dan membantu kelompok rentan ketika terjadi krisis ekonomi.

Oleh karena itu, zakat memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi **ibadah**, karena merupakan kewajiban syariah. Kedua, dimensi **sosial ekonomi**, karena distribusinya memiliki implikasi terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dan Pembangunan Ekonomi

Selain zakat, wakaf memiliki potensi penting dalam pembangunan ekonomi. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib bagi kelompok tertentu, wakaf merupakan instrumen sosial yang dapat diarahkan untuk kepentingan jangka panjang.

Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan fasilitas sosial. Fauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan wakaf memiliki potensi memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi.

Muflihini et al. (2024) juga menyoroti wakaf uang sebagai instrumen keuangan publik Islam yang dapat berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan *nazhir*, kelembagaan, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, wakaf dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi makro Islam, khususnya dalam pembangunan jangka panjang dan penyediaan manfaat sosial.

Stabilitas Harga dan Inflasi

Stabilitas harga merupakan salah satu tujuan penting kebijakan makroekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakpastian, dan memberikan dampak yang lebih berat kepada kelompok berpendapatan rendah.

Dalam perspektif Islam, stabilitas ekonomi berkaitan dengan terciptanya mekanisme pasar yang adil. Praktik penipuan, manipulasi, monopoli yang merugikan, dan spekulasi berlebihan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Namun demikian, ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem yang otomatis menghilangkan inflasi. Inflasi merupakan fenomena kompleks yang dapat disebabkan oleh faktor moneter, fiskal, produksi, distribusi, maupun eksternal.

Karena itu, pengendalian inflasi dalam kerangka ekonomi syariah tetap membutuhkan kebijakan makroekonomi yang efektif. Perbedaannya terletak pada instrumen dan batasan syariah yang digunakan.

Penelitian Meidhany et al. (2023) menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam model yang menguji instrumen keuangan syariah. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya stabilitas harga dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi distribusi dan kesejahteraan sosial.

Instrumen fiskal dalam ekonomi Islam dapat meliputi zakat, pengeluaran publik, pengelolaan aset publik, wakaf, dan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai syariah.

Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat diposisikan sebagai instrumen fiskal yang membantu stabilisasi ekonomi. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, distribusi zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan konsumsi kelompok penerima.

Selain zakat, sukuk dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Dalam konteks modern, sukuk dapat mendukung pembiayaan proyek pemerintah tanpa menggunakan struktur obligasi berbasis bunga.

Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu **stabilisasi** dan **redistribusi**. Kedua fungsi tersebut harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengelolaan kondisi moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama stabilitas harga dan aktivitas ekonomi.

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem konvensional salah satunya terdapat pada larangan riba. Karena itu, sistem moneter Islam tidak menjadikan bunga sebagai instrumen yang mendasari hubungan keuangan.

Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan sistem moneter dan perbankan ganda. Bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Ponziani dan Mariyanti (2019) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki keterkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem tersebut.

Penelitian mengenai instrumen moneter syariah juga menunjukkan bahwa transmisi melalui saluran pembiayaan perbankan syariah dapat dianalisis menggunakan berbagai model ekonometrika. Namun, efektivitas transmisi tersebut masih menjadi persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam (Wahyudi et al., 2021).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi moneter Islam dalam negara modern menghadapi tantangan struktural. Sistem keuangan syariah masih beroperasi dalam lingkungan ekonomi nasional yang secara keseluruhan menggunakan sistem moneter modern.

Karena itu, pengembangan ekonomi moneter Islam tidak hanya membutuhkan produk keuangan syariah, tetapi juga membutuhkan penguatan infrastruktur, pasar, regulasi, dan mekanisme transmisi kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional

Perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional tidak berarti bahwa keduanya memiliki seluruh variabel yang berbeda. Keduanya sama-sama membahas pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, konsumsi, investasi, distribusi, dan kebijakan pemerintah.

Perbedaan utama terletak pada **landasan nilai, tujuan, batasan aktivitas ekonomi, serta instrumen yang digunakan.**

Aspek	Ekonomi Makro Konvensional	Ekonomi Makro Islam
Landasan	Teori ekonomi dan rasionalitas ekonomi	Tauhid dan prinsip syariah
Orientasi	Pertumbuhan, efisiensi, stabilitas	<i>Falah</i> , kemaslahatan, keadilan dan stabilitas
Dimensi moral	Tidak menjadi fondasi utama teori	Menjadi bagian integral
Bunga	Dapat digunakan sebagai instrumen	Riba dilarang
Distribusi	Pajak, transfer dan kebijakan publik	Zakat, wakaf, infak, sedekah dan kebijakan publik
Pembiayaan	Umumnya berbasis bunga	Menggunakan akad yang sesuai syariah
Sektor riil	Tidak selalu menjadi dasar transaksi keuangan	Memiliki hubungan penting dengan aktivitas ekonomi riil
Ukuran kesejahteraan	Dominan menggunakan indikator ekonomi	Material, sosial dan spiritual

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam bukan hanya modifikasi teknis terhadap ekonomi konvensional. Ekonomi makro Islam memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda, meskipun terdapat sejumlah variabel dan metode analisis yang dapat digunakan bersama.

Relevansi Ekonomi Makro Islam terhadap Perekonomian Kontemporer

Ekonomi makro Islam memiliki relevansi terhadap persoalan ekonomi kontemporer, terutama dalam menghadapi ketimpangan, kemiskinan, krisis keuangan, dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertama, **keuangan sosial Islam** dapat menjadi instrumen redistribusi. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kedua, **wakaf produktif** dapat mendukung pembangunan jangka panjang. Digitalisasi pengelolaan wakaf juga membuka peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi pengelolaan (Fauzi et al., 2023).

Ketiga, **instrumen keuangan syariah** seperti sukuk dapat mendukung pembiayaan pembangunan. Penelitian Meidhany et al. (2023) menunjukkan bahwa beberapa instrumen keuangan syariah memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi Indonesia.

Keempat, ekonomi Islam memberikan perhatian pada **keadilan distribusi**. Persoalan ketimpangan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi statistik pembangunan, tetapi sebagai persoalan sosial yang harus diatasi melalui mekanisme distribusi yang adil.

Kelima, ekonomi makro Islam memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kerangka **pembangunan berkelanjutan**. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat memberikan dasar normatif bagi kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan manusia, harta, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan.

SIMPULAN

Penelitian Fundamental ekonomi makro Islam dibangun atas prinsip tauhid, khilafah, amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar filosofis yang membedakan ekonomi makro Islam dari pendekatan konvensional. Ekonomi makro Islam tetap memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, konsumsi, distribusi pendapatan, serta kebijakan fiskal dan moneter, tetapi seluruhnya ditempatkan dalam kerangka nilai syariah.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output nasional. Pertumbuhan harus bersifat produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, distribusi pendapatan menjadi bagian penting dari fundamental ekonomi makro Islam. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi untuk mendukung redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Zakat memiliki posisi strategis karena selain merupakan kewajiban agama, juga memiliki implikasi terhadap konsumsi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Wakaf juga memiliki potensi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, terutama apabila dikelola secara produktif, profesional, dan transparan.

Dalam bidang fiskal, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung stabilisasi dan pemerataan. Dalam bidang moneter, larangan riba menjadi karakteristik fundamental yang mendorong pengembangan mekanisme keuangan berbasis syariah. Namun, penerapan ekonomi makro Islam dalam negara modern masih menghadapi tantangan karena sistem ekonomi dan moneter nasional pada umumnya masih menggunakan sistem konvensional atau sistem ganda.

Dengan demikian, ekonomi makro Islam dapat dipahami sebagai kerangka ekonomi yang berusaha mengintegrasikan pertumbuhan, stabilitas, distribusi, dan kesejahteraan dengan nilai-nilai syariah. Pengembangan ekonomi makro Islam ke depan membutuhkan penelitian empiris yang lebih kuat, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola zakat dan wakaf, serta pengembangan instrumen fiskal dan moneter yang mampu menjawab persoalan ekonomi kontemporer tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation and International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fauzi, R., Astarudin, T., & Khaeruman, B. (2023). Optimization of digital-based waqf and its role in economic development in Indonesia. *Jurnal Sositologi*, 22(1). <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.10>
- Gojali, D., Yakubi, Y., Setiawan, I., Zaky, M., & Rahmah, Y. F. (2024). Zakat and economic growth: Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.15575/jieb.v4i1.40850>
- Hamidi, I., Farhan, M., & Apriani, D. (2024). Investment, ZIS funds, mudharabah financing and economic growth in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v10i01.44>
- Husni, I. S. (2020). Konsep keadilan ekonomi Islam dalam sistem ekonomi: Sebuah kajian konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Isnan, M. F., Supriadi, & Kamaruddin. (2026). Contribution of maqashid syari'ah to sustainable economic development: A conceptual review. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379>

- Meidhany, S. S., Kismawadi, E. R., Zulkarnaini, & Bahri, M. I. (2023). Do Islamic financial instruments and inflation affect economic growth in Indonesia? *Journal of Finance and Islamic Banking*, 5(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v5i1.4790>
- Muflihini, M. D., Faizah, N., Lating, A. I. S., Aripriatiwi, R. A., & Susanto, F. F. (2024). An interpretation of cash waqf for Islamic economic growth and development from the perspective of waqf nazhir. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i2.11857>
- Mustamin, S. W., Abdillah, A. S., Mansyur, F., Ridwan, M., Amri, U., & Fitrayani. (2025). The role of zakat in Islamic macroeconomics: A fiscal instrument for stability during global economic crises. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 253–274. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art10>
- Ponziani, R. M., & Mariyanti, T. (2019). Islamic bank and monetary policy: The case of Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2124>
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The role of zakat, infaq and shadaqah in Indonesia's economic growth: An Islamic perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Siswantoro, S., & Ikhwan, I. (2023). The contribution of Islamic social finance to economic growth in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art1>
- Supratman, I., & Asih, V. S. (2022). The effect of zakat and poverty on economic growth in West Java. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(1), 87–98. <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i1.4645>
- Triyawan, A. (2022). Does investment, zakat, infak and shadaqah and inflation influence the economic growth? Evidence from Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 8–19. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.731>
- Yusoff, M. B. (2006). Fiscal policy in an Islamic economy and the role of zakat. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2), 117–146. <https://doi.org/10.31436/ijema.v14i2.121>